



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan : H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon 021- 5253004 (8 saluran) faksimilie 021-5253139

Website www.kemenkumham.go.id,

PENGUMUMAN

Nomor: SEK.KP.02.01-75

TENTANG

PENGUMUMAN KELULUSAN PENGGANTI MENGUNDURKAN DIRI
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B3004/XII tanggal 23 Januari 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018, sebagai tindak lanjut permohonan persetujuan pengganti peserta CPNS yang mengundurkan diri sebanyak 4 (empat) orang *sebagaimana lampiran I.a*, bersama ini diumumkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai pengganti CPNS yang mengundurkan diri *sebagaimana lampiran I.b*.

Bagi pelamar yang dinyatakan LULUS agar melakukan pemberkasan ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan diri pada hari Kamis atau Jumat, tanggal 7 atau 8 Februari 2019 pukul 09.00 s.d. 15.00 (waktu setempat) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sesuai tempat pelaksanaan seleksi).
2. Menginput data sebelum melakukan pemberkasan ulang pada aplikasi melalui laman <http://cpns.kemenkumham.go.id> mulai tanggal 11 Februari 2019.
3. Melengkapi dan membawa dokumen persyaratan sebagaimana daftar Lampiran II pada:
Tanggal : 18 Februari s.d. 20 Februari 2019
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 15.00 (waktu setempat)
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sesuai tempat pelaksanaan seleksi).

dan memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila dalam jangka waktu tanggal 18 Februari s.d. 20 Februari 2019 peserta tidak melengkapi data dan dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;

5. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://cpns.kemenkumham.go.id> dan twitter @cpnskumham, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
6. Layanan pengaduan hanya melalui telegram @cpnskumham dan Inbox Twitter @cpnskumham.
7. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 4 Februari 2019

Sekretaris Jenderal,



Bambang Rantam Sariwanto
NIK 196012151988021001

Lampiran I Pengumuman
Nomor : SEK.KP.02.01-75
Tanggal : 4 Februari 2019

a. Peserta Yang Mengundurkan Diri

NO.	NOMOR UJIAN	NAMA	JABATAN	JENIS FORMASI	LOKASI UJIAN
1	30041130009078	BIMO SETYAWAN	Pengelola Teknologi Informasi	Umum	DKI Jakarta
2	30041220004538	CYNDI GRACE WEST	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Umum	NTT
3	30041220000970	YESSI MAYANGSARI PUTRI	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Umum	Jawa Timur
4	30041120088568	AKMAL	Penjaga Tahanan	Umum	Aceh

b. Peserta Yang Dinyatakan Lulus Sebagai Pengganti

NO.	NOMOR UJIAN	NAMA	JABATAN	JENIS FORMASI	LOKASI UJIAN
1	30041130009374	ISMAIL	Pengelola Teknologi Informasi	Umum	Sumatera Utara
2	30041120007568	MUSLIM NASUTION	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Umum	Riau
3	30041120003190	EEN LABERMA	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Umum	DKI Jakarta
4	30041120087588	ARY ZULFAN	Penjaga Tahanan	Umum	Aceh



Jakarta, 4 Februari 2019

Sekretaris Jenderal

Bambang Rantam Sariwanto

NIP 196012151988021001

DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERKASAN ULANG:

1. Surat Lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta (*ditulis tangan dengan tinta hitam/ballpoint dan bermaterai Rp. 6000 dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, tanggal surat sama dengan tanggal surat yang dikirim ke Po. BOX atau diunggah pada saat tahap seleksi administrasi*) (rangkap 3 asli). *contoh dapat diunduh website <http://cpns.kemenkumham.go.id>*
2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran (rangkap 3 legalisir).
 - SLTA sederajat dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan, Kabag/Kabid/Kasubdin atau yang setingkat dan kompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten/ Kota.**
 - Diploma III (D III) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Direktur Program, Dekan, Ketua.**
 - Sarjana (S1)/ Diploma IV Perguruan tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Rektor, Dekan, Pembantu Dekan I Bidang Akademik, Ketua, Wakil Ketua I Bidang Akademik.**
 - Dokter Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Rektor, Dekan, Pembantu Dekan I Bidang Akademik, Ketua, Wakil Ketua I Bidang Akademik.**
3. Surat penetapan penyetaraan dari **Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan** (khusus Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri). (rangkap 3 legalisir)
4. Daftar Riwayat Hidup (terlampir, *ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta hitam/ballpoint, bermaterai Rp.6000, rangkap 3 asli, tanggal DRH dibuat sama dengan tanggal surat lamaran*). *dapat diunduh website <http://cpns.kemenkumham.go.id>*
5. Surat Pernyataan Super 5 Point (diberi materai 6000 serta ditandatangani bertinta hitam, rangkap 3 asli, tanggal dibuat sama dengan surat lamaran). *dapat diunduh website <http://cpns.kemenkumham.go.id>*
6. Surat Pernyataan Super 7 Point (terlampir, diketik dan diberi materai 6000 serta ditandatangani bertinta hitam, rangkap 3 asli, tanggal dibuat sama dengan tanggal pada surat lamaran) *dapat diunduh website <http://cpns.kemenkumham.go.id>*
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan 31 Maret 2019 (asli dan 2 fotocopy dilegalisir).
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus di tandatangani oleh Dokter (asli dan 2 fotocopy, tanggal surat minimal dalam bulan Pebruari 2019).
9. Surat Keterangan Sehat Rohani/ Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus di tandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (asli dan 2 fotocopy, tanggal surat minimal dalam bulan Pebruari 2019).
10. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru ditandatangani oleh Dokter serta melampirkan hasil laboratorium (asli dan 2 fotocopy, tanggal surat minimal dalam bulan Pebruari 2019).
11. Pasfoto 3x4 berlatar belakang merah (10 lembar) dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut.
12. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku / Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-elektronik dari Dukcapil (3 lembar Fotocopy).
13. Berkas lamaran rangkap 3 (tiga) dimasukkan dalam Stopmap:
 - Warna hijau untuk kualifikasi pendidikan Magister, Sarjana, Diploma IV
 - Warna kuning untuk kualifikasi pendidikan Diploma III
 - Warna merah untuk kualifikasi SLTAdi luar Stopmap tertulis:
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Nomor Ujian

- Jabatan yang dilamar
- Pendidikan
- Alamat Sekarang
- Nomor Telepon HP yang mudah dihubungi
- Alamat Email



Jakarta, 4 Februari 2019

Sekretaris Jenderal,



Bambang Rantam Sariwanto

NIP. 196012151988021001